



BUDAYA PANGGUNG UNTUK YANG BERMASALAH: REFLEKSI ATAS RENDAHNYA CANCEL CULTURE DI INDONESIA

STAGE CULTURE FOR THE TROUBLED: REFLECTIONS ON THE LACK OF CANCEL CULTURE IN INDONESIA

Vania Jasmine Aisha

Universitas Negeri Jakarta

Email : vvaniajasmine27@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2025

Revised : 19-06-2025

Accepted : 21-06-2025

Published : 24-06-2025

Abstract

Cancel culture as a social correction mechanism in Indonesia's digital space tends to be performative rather than transformative. Unlike the global trend of using it as a tool for social control over ethical violations, in Indonesia this phenomenon is more often a "stage culture" that viralizes the perpetrators of violations rather than imposing sustainable sanctions. This qualitative study based on literature review reveals that low digital literacy, particularly in critical thinking, algorithm understanding, and ethical awareness, causes cancel culture to develop as a short-term emotional reaction rather than as an instrument of social change. The dominance of echo chambers and the logic of virality reinforce polarization, while public figures who are "canceled" often regain their platform. Analysis shows that the effectiveness of cancel culture is hindered by three factors: (1) an entertainment culture that prioritizes sensation over substance, (2) the absence of a digital communication ethics framework, and (3) the role of mainstream media in exploiting controversy for ratings. This study recommends a restorative justice approach and the strengthening of multidimensional digital literacy so that the digital public sphere can function as a medium for deliberation, not merely a stage for moral spectacle.

Keywords : Cancel Culture, Digital Literacy, Stage Culture

Abstrak

Cancel culture sebagai mekanisme koreksi sosial di ruang digital Indonesia cenderung bersifat performatif dan tidak transformatif. Berbeda dengan tren global yang menggunakannya sebagai alat kontrol sosial terhadap pelanggaran etis, di Indonesia fenomena ini lebih sering menjadi "budaya panggung" yang memviralkan pelaku pelanggaran alih-alih memberikan sanksi berkelanjutan. Penelitian kualitatif berbasis studi literatur ini mengungkap bahwa rendahnya literasi digital khususnya dalam berpikir kritis, pemahaman algoritma, dan kesadaran etis menyebabkan cancel culture berkembang sebagai reaksi emosional jangka pendek, bukan sebagai instrumen perubahan sosial. Dominasi *echo chamber* dan logika viralitas memperkuat polarisasi, sementara figur publik yang "dibatalkan" justru sering kembali mendapatkan panggung. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas cancel culture terhambat oleh tiga faktor: (1) budaya hiburan yang mengutamakan sensasi atas substansi, (2) ketiadaan kerangka etika komunikasi digital, dan (3) peran media arus utama yang memanfaatkan kontroversi untuk rating. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif dan penguatan literasi digital multidimensi agar ruang publik digital dapat berfungsi sebagai medium deliberasi, bukan sekadar panggung spektakel moral.

Kata Kunci : Budaya Panggung, Cancel culture, Literasi Digital



PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang sangat menentukan narasi sosial dalam masyarakat digital. Dalam konteks ini, *cancel culture* muncul sebagai bentuk sanksi sosial kolektif terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma, etika, atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh masyarakat dunia maya. Praktik ini seringkali dilakukan melalui tindakan boikot, pembatalan dukungan, hingga pengucilan simbolik di berbagai platform digital. Namun demikian, di Indonesia, fenomena ini tidak berkembang sebagaimana yang terjadi di negara-negara dengan tradisi sipil yang kuat. *Cancel culture* di Indonesia lebih sering bersifat performatif daripada transformatif, di mana pengucilan hanya berlangsung secara viral sesaat, tanpa diikuti dengan perubahan struktural atau penyadaran sosial yang lebih dalam (Khairunniza et al., 2023).

Budaya digital Indonesia memperlihatkan kecenderungan masyarakat untuk lebih menjadi penonton daripada pelaku dalam menghadapi ketidakadilan atau pelanggaran norma melalui media sosial (Izzatul et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya panggung yakni kebutuhan untuk tampil, menilai, dan merespon secara dangkal di depan audiens digital lebih dominan dibandingkan dengan budaya advokasi yang berorientasi pada perubahan. Ketika pelanggaran moral atau etika terjadi di ruang digital, masyarakat cenderung mengikuti arus opini populer tanpa menelusuri akar persoalan atau menawarkan solusi. *Cancel culture* tidak menjadi instrumen pembelajaran sosial, tetapi berubah menjadi tontonan kolektif yang mudah dilupakan seiring dengan datangnya isu baru.

Keberadaan *cancel culture* juga menimbulkan efek psikososial yang signifikan. Menurut Neuman dalam teori *spiral of silence*, dominasi opini mayoritas yang tidak toleran dapat menimbulkan ketakutan untuk menyatakan pendapat yang berbeda. Di Indonesia hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital kritis dan empati sosial di kalangan pengguna internet. Ekokamar (echo chamber) yang dibentuk oleh algoritma media sosial memperkuat bias kelompok dan mempersempit ruang dialog yang sehat. Alih-alih mendorong penyelesaian konflik atau transformasi sosial, praktik pembatalan hanya menghasilkan polarisasi dan tekanan sosial yang bersifat sementara, tanpa menyentuh esensi permasalahan (Khairunniza et al., 2023).

Fenomena ini menimbulkan permasalahan penting, yakni mengapa *cancel culture* di Indonesia tidak berkembang sebagai mekanisme sosial yang efektif untuk mendisiplinkan kekuasaan atau memperjuangkan keadilan? Apa yang menyebabkan budaya digital kita lebih memfasilitasi ekspresi kemarahan kolektif sesaat dibandingkan dialog yang membangun dan berkelanjutan? Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebenarnya memiliki peran strategis dalam menumbuhkan keterampilan resolusi konflik, empati, dan berpikir kritis yang diperlukan untuk merespons fenomena seperti *cancel culture* dengan bijaksana. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan rendahnya efektivitas *cancel culture* di Indonesia sebagai sarana koreksi sosial dan bagaimana budaya panggung dalam masyarakat digital justru memperlemah potensi pembentukan kesadaran kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memahami dan menganalisis fenomena *cancel culture* dalam konteks budaya digital di Indonesia. Studi literatur dipilih karena



pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun beragam perspektif teoritis dan empiris yang telah ada, serta menyusun sintesis pemikiran yang mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, jurnal nasional dan internasional, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik seperti budaya media sosial, perilaku warganet, konflik sosial digital, kebebasan berekspresi, dan dinamika komunikasi publik di era digital. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, keterkinian data, serta relevansi substansi dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cancel culture atau budaya membatalkan, merupakan fenomena sosial di mana seseorang atau kelompok secara kolektif diboikot atau dikucilkan dari ruang publik akibat pelanggaran norma atau etika tertentu. Dalam konteks global, terutama di negara-negara Barat, cancel culture telah menjadi bentuk kontrol sosial yang kuat terhadap figur publik yang bermasalah, khususnya terkait isu pelecehan seksual, rasisme, atau korupsi. Di Indonesia fenomena ini mulai dikenal luas di era media sosial, namun karakteristiknya memiliki perbedaan signifikan dibandingkan negara lain. Cancel culture di Indonesia cenderung berumur pendek, emosional, dan minim dampak nyata. Seorang figur publik yang tengah diboikot pun sering kali kembali mendapatkan panggung dan dukungan hanya dalam hitungan waktu singkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan arah perkembangan budaya digital Indonesia dalam mengatur perilaku sosial (Djamzuri & Mulyana, 2024).

Istilah "budaya panggung untuk yang bermasalah" menggambarkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang tidak hanya memberi ruang, tetapi juga memberi sorotan besar kepada individu yang telah melakukan kesalahan etis. Fenomena ini tercermin dalam kasus-kasus viral yang kemudian malah menjadi ajang promosi atau penambahan popularitas bagi pelakunya. Sebagai contoh, film "Budi Pekerti" secara gamblang menunjukkan bagaimana sosok Bu Prani, seorang guru yang menjadi korban viralitas, mengalami penghakiman publik yang tidak adil. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan atau dukungan sosial, Bu Prani justru kehilangan ruang hidupnya karena masyarakat lebih menikmati sensasi drama ketimbang mencari keadilan. Budaya ini menjadikan individu yang bermasalah bukan sebagai subjek yang harus dipulihkan atau dikritik secara konstruktif, melainkan sebagai objek tontonan massal. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran nilai sosial, di mana substansi etik digantikan oleh sensasionalisme (Budi & Muadz, 2025).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan cancel culture di Indonesia tidak berjalan optimal adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya Generasi Z. Berdasarkan penelitian Anisti et al., (2024), Gen Z menghadapi tantangan serius dalam tiga aspek literasi digital: berpikir kritis, pemahaman algoritmik, dan kesadaran etis. Akibatnya, banyak pengguna media sosial yang tidak mampu mengevaluasi informasi secara objektif, mudah terprovokasi oleh isu viral, serta impulsif dalam memberikan komentar. Dalam ruang digital yang didorong oleh algoritma, konten sensasional jauh lebih cepat menyebar dibandingkan konten edukatif. Hal ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat, di mana masyarakat lebih fokus pada viralitas ketimbang akurasi informasi atau



keadilan sosial. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan budaya digital yang sehat dan beradab.

Cancel culture dapat menjadi alat resistansi sosial dari masyarakat terhadap kekuasaan atau pelanggaran moral yang dilakukan oleh figur publik. Namun, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Syapriani et al., (2025) cancel culture di Indonesia masih bersifat reaktif, emosional, dan kurang terorganisir. Di ruang komentar media sosial seperti Twitter, resistansi sosial muncul dalam bentuk sindiran, sarkasme, hingga ujaran kebencian, bukan kritik argumentatif yang bersifat membangun. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki energi untuk mengkritik, namun tidak memiliki kerangka etika dan strategi komunikasi yang memadai. Cancel culture pun gagal menjadi kekuatan kontrol sosial, dan malah berubah menjadi alat perundungan massal atau hiburan digital semata. Ini membuktikan bahwa resistansi sosial memerlukan basis literasi etika dan media yang kuat agar dapat berjalan secara efektif.

Ruang digital Indonesia saat ini sangat rentan terhadap fenomena echo chamber, yaitu kondisi ketika pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan pribadi mereka. Penelitian Fadilah (2024) menunjukkan bahwa cancel culture di platform seperti X (dulu Twitter) lebih sering menghasilkan fragmentasi sosial dan eksklusi pandangan minoritas. Dalam kondisi ini, cancel culture bukan lagi alat koreksi sosial, melainkan ajang penghakiman satu arah oleh kelompok dominan. Dialog rasional dan inklusif terhambat oleh bias algoritmik dan keterbatasan ruang untuk perspektif berbeda. Akibatnya, ruang publik digital kehilangan fungsi deliberatifnya dan berubah menjadi arena kompetisi narasi dan tekanan psikologis. Ini menjelaskan mengapa cancel culture di Indonesia sulit berkembang secara etis dan produktif.

Rendahnya efektivitas cancel culture di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari budaya hiburan yang melekat kuat pada konsumsi media masyarakat. Figur publik lebih sering dipandang sebagai sumber hiburan ketimbang panutan moral. Ketika mereka melakukan kesalahan, masyarakat justru memberikan perhatian lebih yang secara tidak langsung menjadi bentuk insentif sosial. Tidak sedikit figur yang kembali diundang tampil di media setelah skandal karena dianggap mendongkrak rating atau interaksi. Budaya ini mematahkan logika cancel culture sebagai bentuk hukuman sosial, karena tidak ada kontinuitas dalam sanksi moral. Media arus utama turut andil dalam melanggengkan budaya panggung ini dengan terus menayangkan dan memberitakan figur bermasalah demi mendapatkan klik dan rating tinggi. Tanpa perubahan pada ekosistem media, cancel culture tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai alat transformasi sosial (Revalina, 2025).

Untuk menjadikan cancel culture sebagai alat kontrol sosial yang sehat, perlu dilakukan berbagai reformasi struktural dan kultural. Pertama, pendidikan literasi digital harus diperluas, tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga berpikir kritis, etika komunikasi, dan kesadaran algoritmik. Kedua, platform media sosial perlu menerapkan kebijakan yang mendukung diskursus sehat dan menindak penyebaran konten merugikan secara tegas. Ketiga, media arus utama harus bertanggung jawab dengan tidak mengejar sensasi atas nama rating. Keempat, masyarakat perlu dibekali dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang memungkinkan pelaku belajar dan memperbaiki diri, bukan semata-mata dihukum tanpa kejelasan. Cancel culture seharusnya tidak dimaknai sebagai ajang balas dendam, melainkan sebagai koreksi sosial yang dilandasi etika, bukti, dan keadilan. Dengan pendekatan ini, cancel culture dapat menjadi instrumen edukatif dan bukan sekadar tontonan digital (Fadilah, 2024).



Fenomena budaya panggung untuk yang bermasalah mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat digital yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. *Cancel culture* yang seharusnya menjadi alat koreksi sosial justru kehilangan makna karena dimanfaatkan sebagai alat viralitas dan sensasi. Di tengah derasnya informasi dan tekanan algoritmik, masyarakat perlu dipersenjatai dengan literasi yang kuat dan etika yang mendalam. Hanya dengan cara ini, ruang digital dapat menjadi medium transformasi sosial yang nyata, bukan sekadar etalase kekacauan moral yang terus berulang (Fadilah, 2024).

KESIMPULAN

Cancel culture di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda dibanding negara lain. Alih-alih menjadi alat koreksi sosial yang efektif, fenomena ini justru bersifat emosional, berumur pendek, dan minim dampak nyata. Figur publik yang diboikot sering kali kembali populer dalam waktu singkat, menunjukkan lemahnya kontinuitas sanksi moral dalam budaya digital kita.

Istilah “budaya panggung untuk yang bermasalah” mencerminkan kecenderungan masyarakat yang justru memberi sorotan lebih pada pelaku pelanggaran etis, menjadikannya tontonan, bukan subjek koreksi. Rendahnya literasi digital, terutama di kalangan Gen Z, memperparah kondisi ini karena mendorong perilaku impulsif dan minim kesadaran etis.

Selain itu, dominasi *echo chamber* dan logika viralitas di media sosial mempersempit ruang dialog yang sehat dan membatasi keberagaman perspektif. Tanpa fondasi literasi digital dan etika komunikasi yang kuat, *cancel culture* justru berubah menjadi ajang perundungan atau hiburan semata. Agar *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial yang adil dan edukatif, perlu dibangun ekosistem digital yang sehat melalui literasi digital, tanggung jawab media, dan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Tanpa itu, ruang publik digital akan terus menjadi panggung sensasi alih-alih arena transformasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan selama proses penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada para dosen dan pembimbing atas ilmu, arahan, serta motivasi yang diberikan. Terima kasih juga kepada keluarga, teman, serta rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan masukan yang berarti. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisti, Sidarta, V., Imran, M., & Syatir. (2024). TANTANGAN LITERASI DIGITAL GENERASI Z : KAJIAN SISTEMATIC. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 30(2), 152–161.
- Budi, J. A. P., & Muadz. (2025). REPRESENTASI DAMPAK CYBERBULLYING PADA KORBAN DALAM FILM BUDI PEKERTI (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES). *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Djamzuri, M. I., & Mulyana, A. P. (2024). Cancel Culture di Era Media Baru : Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial dalam Kasus Overclaim Skincare. *Jurnal Nuansa Akademik*, 9(2), 523–534.
- Fadilah, N. N. (2024). FENOMENA CANCEL CULTURE DI PLATFORM “ X ”:



PENGHAKIMAN PUBLIK DALAM RUANG DIGITAL. *Journal ComSosMed*, 01(02), 28–35.

Izzatul, N., Nadia, F. S., Dian, A. M. Q., Zafira, W. A., Ika, A. Z., & Putri, S. E. (2025). The Morphological Transformation of Indonesian: Impacts of Social Media and Globalization. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1506–1513.

Khairunniza, L. D. E., Maftuh, B., & Setiadi, E. M. (2023). MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA FENOMENA CANCEL CULTURE DAN PEMBENTUKKAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KONFLIK) Dinamika sosial di Indonesia pada era digital menghadirkan berbagai perubahan y. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5, 137–150.

Revalina, A. (2025). PERUBAHAN NORMA ETIKA DALAM HUBUNGAN SOSIAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi*, 3(6), 223–231.

Syapriani, I., Putriana, D., Aula, R. P., Sembiring, G. S., Aulia, V., & Khoiria, S. (2025). Strategi Komunikasi Pengguna Media Sosial Dalam Mengelola Bahasa, Etika, Dan Resistansi Sosial Di Ruang Komentar Platform Digital X(Twitter). *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 360–368.